

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA YOGYAKARTA DALAM
MENCEGAH DAN MENAGGULANGI BENCANA KEBAKARAN DI KOTA
YOGYAKARTA PADA TAHUN 2017**

Disusun Oleh:

Citra Puspita Dewi

20140520181

Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Desember 2018

Tempat : Ruang sidang ujian IP 1

Pukul : 10.30-11.30

Dosen Pembimbing



Rahmawati Husein, MCP, Ph.D

NIDN : 0522086901

Mengetahui

Dekan Fakultas

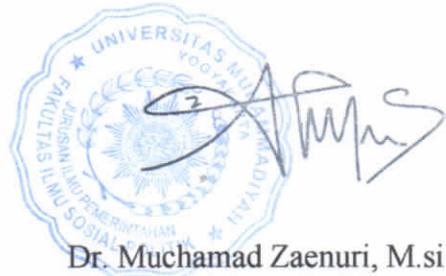
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., Msi

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.si

**PERAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH
DAN MENAGGULANGI BENCANA KEBAKARAN DI KOTA YOGYAKARTA PADA
TAHUN 2017**

Citra Puspita Dewi¹*

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan
Brawijaya, Bantul, DIY, 55183, Indonesia.

citrapid@gmail.com

Rahmawati Husein² Eko Priyo Purnomo³

Lecturer at the Department of Governmental Studies and a fellow at Jusuf Kalla's School of
Government (JKSG)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

amahusein@umy.ac.id, eko@umy.ac.uk

SINOPSIS

Kebakaran dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa bisa diprediksi kejadiannya. Pada tahun 2015, kerugian dari kebakaran di DIY mencapai Total Rp2,04 Miliar. Angka kebakaran di Indonesia masih sangat tinggi, dibandingkan tingkat kebakaran yang terjadi di luar negeri. Penyebabnya dari segi fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya kemampuan personil pemadam kebakaran. Hal ini dapat mempengaruhi terhambatnya proses pelayanan (Adelberty, 2014). Masalah kebakaran yang terjadi memerlukan perhatian terhadap 2 aspek pokok yakni aspek pencegahan dan penanggulangan.

Terdapat beberapa pendapat terkait peran pemerintah. Dalam hal ini dikhususkan Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini, menggunakan teori dari Kuncoro (2004:113) yang mengemukakan peran pemerintah mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator. Dalam menjalankan peran wirausaha, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pemerintah daerah menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan tanah dan bangunan untuk tujuan yang bersifat ekonomi. Hal ini diwujudkan dengan penyewaan alat pemadam kebakaran. Dalam peran koordinator, perannya adalah sebagai pembuat strategi dan koordinasi dengan pihak lain. Hal ini diwujudkan dengan pengawasan, pemberian bimbingan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya. Sebagai fasilitator, peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta bertindak sebagai penyedia fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perbaikan lingkungan, dan perbaikan prosedur. Hal ini diwujudkan dengan membangun infrastruktur damkar, penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran. Sebagai stimulator, peran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta melakukan usaha-usaha khusus dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Hal ini diwujudkan dengan: peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pengelolaan sarana prasarana kebakaran.

Kata kunci : Peran Pemerintah, Dinas Kebakaran, Kota Yogyakarta

SYNOPSIS

Fires can happen to anyone, anywhere and anytime without being predicted. In 2015, losses from fires in DIY totaled Rp2.04 billion. The number of fires in Indonesia is still high, compared to the level of fires that occurred abroad. The cause is in terms of inadequate facilities and infrastructure, and the lack of ability of firefighters. This can affect the obstruction of the service process (Adelberty, 2014). Fires problems that occur require attention to 2 main aspects, namely aspects of prevention and mitigation.

There are several opinions related to the role of the government. In this case, the role of the Yogyakarta Fire Department is specified. In this study, using a theory from Kuncoro (2004: 113) which suggests the role of government includes the roles of entrepreneurs, coordinators, facilitators and stimulators. In carrying out the role of entrepreneurship, the Yogyakarta City Fire Service as part of the local government runs a business by utilizing land and buildings for economic purposes. This is realized by leasing fire extinguishers. In the coordinating role, the role is as a strategy maker and coordination with other parties. This is realized by supervision, providing guidance and coordinating, collaborating with relevant agencies and other institutions. As a facilitator, the role of the Yogyakarta City Fire Department acts as a provider of fires prevention and prevention facilities, environmental improvements, and procedure improvements. This is realized by building fire infrastructure, education and fire hazard education. As a stimulator, the role of the Yogyakarta City Fire Service made special efforts in the prevention and prevention of fire disasters. This is realized by: increasing the capacity of apparatus resources and managing fire infrastructure.

Keywords: The Role of the Government, the Fire Service, the City of Yogyakarta

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di wilayah perkotaan menyebabkan terjadinya urbanisasi di kota-kota besar termasuk yang terjadi di Kota Yogyakarta. Kota dengan luas wilayah 32,50 km² dan jumlah penduduk 489.000 jiwa membuat Kota Yogyakarta tergolong sebagai Kota yang padat penduduk (BPKP, 2018). Pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan penduduk secara alamiah dimana kebutuhan masyarakat akan berbagai fasilitas seperti perumahan, sarana dan prasarana perbelanjaan, hiburan, transportasi serta fasilitas publik lainnya semakin tinggi (BPBD Purwakarta, 2017). Dengan keadaan tersebut perkotaan memiliki masalah-masalah utama yang membutuhkan perhatian lebih dan salah satunya adalah kebakaran. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (dalam Simangunsong, 2017) kebakaran yang terjadi pada tahun 2011, terjadi sebanyak 16.500 kebakaran di 498 kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Di Medan kebakaran terjadi sebanyak 163 kali, Surabaya 187 kejadian, Bandung 163 kali, Bekasi 127 kali, Depok 124 kali, dan Tangerang 167 kali.

Pada tahun 2015, kerugian dari kebakaran di DIY mencapai Total Rp2,04 Miliar. Kebakaran ini terdiri dari kebakaran rumah rakyat sebanyak 25 kebakaran, kebakaran pada perusahaan toko sebanyak 16 kebakaran, dan 17 kebakaran pada kendaraan. Sementara itu, kebakaran pada sektor lain-lain yang tidak teridentifikasi dalam kategori benda terbakar, sebanyak 49 kebakaran (harianjogja.com).

Angka kebakaran di Indonesia masih sangat tinggi, dibandingkan tingkat kebakaran yang terjadi di luar negeri. Penyebabnya dari segi fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya kemampuan personil pemadam

kebakaran, hal ini dapat mempengaruhi terhambatnya proses pelayanan (Adelberty, 2014). Ditambah lagi dengan tidak tersedianya alat pemadam kebakaran di setiap hunian maupun gedung atau yang lebih dikenal dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) juga menjadi salah satu kendala dalam menangani kebakaran. Urgensi dari keberadaan APAR akan sangat berpengaruh dalam menanggulangi kebakaran. Alat yang digunakan saat kebakaran pertama kali terjadi ini dapat memadamkan sumber api dengan cepat dan tuntas sehingga tidak perlu mengandalkan petugas pemadam kebakaran untuk sampai ke lokasi jika timbul potensi sumber api yang mungkin membesar. Adapun di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 mengalami bencana kebakaran dengan data sebagai berikut :

Tabel 1. Angka/data kejadian di Kota Yogyakarta periode 1 Januari-30 November 2017

NO	KEJADIAN	DALAM KOTA	LUAR KOTA	JUMLAH
1	PEMADAMAN	71	79	150
2	EVAKUASI	34	11	45
3	PENYIRAMAN	8	0	8
4	PENGAMANAN	36	0	36
	Jumlah	134	88	217

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2017)

Tabel 2. Angka/data penyebab kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta periode 1 Januari - 30 November 2017

NO	KEJADIAN	JUMLAH
1	KONSLETING LISTRIK (HUB. ARUS PENDEK)	39
2	KEBOCORAN GAS	9
3	PEMBAKARAN SAMPAH	6
4	CAIRAN MUDAH TERBAKAR	2
5	PUNTUNG ROKOK	1
6	BELUM DIKETAHUI	14
	JUMLAH	71

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2017)

Tabel 3. Angka/data kejadian kebakaran per-kecamatan Kota Yogyakarta periode 1 Januari-30 November 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	UMBULHARJO	16
2	GONDOKUSUMAN	11
3	TEGALREJO	11
4	GEDONG TENGEN	5
5	JETIS	5
6	MANTRIJERON	4
7	WIROBRAJAN	4
8	GONDOMANAN	4
9	NGAMPILAN	3
10	KRATON	2
11	KOTAGEDE	2
12	MERGANGSAN	3
13	PAKUALAMAN	1
14	DANUREJAN	0
	JUMLAH	71

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2017)

Masalah kebakaran yang terjadi memerlukan perhatian terhadap 2 aspek pokok yakni aspek pencegahan dan penanggulangan, kedua aspek ini bertujuan agar dapat menjamin keselamatan warga negara dan meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Dalam aspek pencegahan kebakaran, hal yang perlu diketahui adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran. Karena dengan mengetahui aspek pencegahan kebakaran dapat menurunkan terjadinya angka kebakaran di suatu wilayah dengan potensi kebakaran tinggi seperti di Kota Yogyakarta.

Sedangkan dalam aspek penanggulangan, upaya yang dilakukan adalah dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran. Hal ini perlu dipahami agar bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan pengaruh terkena pancaran api sejak awal terjadi hingga ketika menimbulkan kebakaran dapat diketahui penyebabnya

sehingga dapat menurunkan resiko kerugian dan memprioritaskan aspek keamanan.

Namun banyak kendala yang dialami saat petugas Dinas Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas pemadaman di Kota Yogyakarta. Maka dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.

2. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori dari Kuncoro (2004:113) yang mengemukakan peran pemerintah mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator. Dalam menjalankan peran wirausaha, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pemerintah daerah menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan tanah dan bangunan untuk tujuan yang bersifat ekonomi. Hal ini diwujudkan dengan penyewaan alat pemadam kebakaran. Dalam peran koordinator, perannya adalah sebagai pembuat strategi dan koordinasi dengan pihak lain. Hal ini diwujudkan dengan pengawasan, pemberian bimbingan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya. Sebagai fasilitator, peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta bertindak sebagai penyedia fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perbaikan lingkungan, dan perbaikan prosedur. Hal ini diwujudkan dengan membangun infrastruktur Dinas Kebakaran, penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran. Sebagai stimulator, peran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan usaha-usaha khusus dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur dan pengelolaan sarana prasarana kebakaran

Pencegahan Kebakaran

Suma'mur (dalam Iraniana, 2009) mengemukakan bahwa pencegahan kebakaran yaitu semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan kekayaan.

Penanggulangan Kebakaran

Penanggulangan kebakaran menurut keputusan menteri tenaga kerja R.I no.kep.186/men/1999 ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.

3. METODE PENELITIAN

Metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan hasil data berupa deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Wirausaha

Penyewaan Aset Mobil Pemadam Kebakaran

Dalam menjalankan peran wirausaha, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pemerintah daerah menjalankan suatu usaha bisnis

dengan memanfaatkan aset mobil pemadam kebakaran untuk tujuan yang bersifat ekonomis. Penyewaan aset Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta diatur pada peraturan daerah Kota Yogyakarta No 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha yang masuk ke kas daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi yang diatur dalam peraturan daerah.

Pemasukan wirausaha dihasilkan dari penyewaan mobil kebakaran untuk keperluan berbagai acara. Dalam hal penyewaan mobil pemadam kebakaran, pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tidak melakukan promosi khusus, hal ini dikarenakan pihak acara akan secara otomatis membutuhkan keberadaan pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

Hal tersebut menjadi keuntungan karena dengan banyaknya gelaran acara di luar Kota Yogyakarta seperti di daerah Bantul dan Sleman, membuat pihak penyelenggara acara lebih memilih menyewa mobil pemadam kebakaran ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta. Hal ini karena Dinas Pemadam Kebakaran daerah Kota merupakan wilayah induk dengan fasilitas kebakaran yang lengkap. Namun karena berbeda wilayah kerja, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta lebih menyarankan peminjaman mobil pemadam kebakaran ke wilayah setempat penyelenggaraan acara. Adapun biaya yang dibebankan untuk sewa aset ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian biaya penyewaan mobil pemadam kebakaran

no	Jenis Barang Milik Daerah	Satuan	Tarif
1	Mobil pemadam Kebakaran 4.000 liter(Power take over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	400.000
	b. Standby	per 4 jam	500.000
	c. Konser	per 4 jam	850.000
	d. Syuting film	per 4 jam	900.000
	e. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas kota	per KM	10.000
	f. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	Per isi ulang	220.000
	g. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dari tarif
2	Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	700.000
	b. Standby	per 4 jam	950.000
	c. Konser	per 4 jam	1.500.000
	d. Syuting film	per 4 jam	1.700.000
	e. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas kota		20.000
	f. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman		460.000
	g. Kelebihan waktu pemakaian		25% dari tarif
3	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran		1.500.000

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2017)

Selain berguna dalam mencegah terjadinya kebakaran, sewa aset yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta juga menghasilkan keuntungan sebesar Rp 44.930.000 selama tahun 2017.

2.Peran Koordinator

Peran koordinator yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian bimbingan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pengawasan adalah salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta guna pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Dalam menjalankan tugasnya, divisi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan adalah Bidang Pencegahan Kebakaran yaitu Seksi Pencegahan Pengawasan dan Pengendalian. Pengawasan yang dilakukan mengacu pada peraturan menteri pekerjaan

umum no 24/PRT/M tahun 2008 tentang pedoman dan pemeliharaan gedung.

Pada mulanya, seluruh pemeriksaan syarat Izin Pendirian Bangunan (IMB) termasuk pemeriksaan instalasi kebakaran bagi gedung adalah ranah pihak perizinan, namun pihak perizinan tidak tahu secara rinci mengenai proteksi kebakaran seperti apa yang dibutuhkan suatu bangunan. Pada akhirnya, hal tersebut menjadi wewenang Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

Selama tahun 2017, Jumlah pengajuan pengawasan gedung adalah 353 bangunan dan diperiksa sesuai dengan gambar perencanaan, sistem proteksi kebakaran, fungsi bangunan, luas bangunan dan tinggi bangunan yang telah terlampir dalam syarat pengajuan.

Adapun dalam hal pemeriksaan suatu bangunan, substansi atau materi yang dilaporkan dalam pemeriksaan keamanan menurut peraturan menteri pekerjaan umum nomor 26/PRT/M/2008 tanggal 30 desember 2008 mencakup sekurang-kurangnya : 1) Identifikasi bangunan gedung 2) Konsep perancangan sistem proteksi kebakaran 3) Aksesibilitas untuk mobil pemadam kebakaran 4) Sarana jalan ke luar yang ada atau tersedia 5) Persyaratan struktur terhadap kebakaran yang dipenuhi 6) Sistem pengendalian asap 7) Sistem deteksi dan alarm kebakaran 8) Sistem pemadam kebakaran 9) Sistem daya listrik darurat 10) Sistem pencahayaan untuk menunjang proses evakuasi 11) Sistem komunikasi dan pemberitahuan keadaan darurat 12) Lif kebakaran 13) Daerah dengan risiko atau potensi bahaya kebakaran tinggi 14) Skenario kebakaran yang mungkin terjadi 15) Eksistensi manajemen penanggulangan terhadap kebakaran.

Dalam menjalankan prosedur pemeriksaan tersebut terdapat beberapa

hambatan, hal ini seperti pada pemeriksaan proteksi yang hanya terbatas pada tinjauan ketersediaan Alat Proteksi Kebakaran (APAR) tidak termasuk fungsi dan hal-hal mendasar lain mengenai sistem instalasi, hal tersebut karena pemeriksaan sistem secara keseluruhan akan memakan waktu dan biaya yang besar ditambah lagi personil yang hanya 3 orang akan sangat melelahkan. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah sulitnya menemukan bangunan karena beberapa kali ditemukan, informasi pemilik dan nama bangunan berbeda ditambah lagi penulisan alamat yang tidak lengkap.

Aspek yang mendasar sebenarnya belum ada perda yang kuat agar Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mengeluarkan sanksi terhadap bangunan yang menyalahi aturan proteksi. Hingga kini, pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta hanya sebatas memberi saran terhadap pemasangan proteksi tanpa bisa memberi sanksi tegas. Hal ini membuat kekuatan hukum melemah dan pelanggaran sering terulang kembali.

Langkah keamanan semakin perlu di tingkatkan karena melihat padatnya pembangunan di Kota Yogyakarta baik hotel, tempat usaha dan gedung tinggi yang berdiri tanpa mengikuti prosedur proteksi pemadam kebakaran yang sesuai. Maka sudah seharusnya peningkatan standar keamanan menjadi perlu ditingkatkan.

Pemberian Bimbingan

Pada tahun 2017, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta membuka rekrutmen terbuka untuk mencari tenaga teknis yang disebut dengan Bantuan Relawan Kebakaran (BALAKAR). Rekrutmen terbuka dilakukan karena setiap tahunnya Aparatur Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta berkurang disebabkan beberapa orang telah memasuki masa pensiun selain itu, penambahan tenaga

teknis juga bertujuan dalam pengoptimalan tugas operasional. Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu personil yang ada dapat dikatakan belum memenuhi standar ideal yaitu 200 lebih personil untuk 3 shift jaga, adapun personil yang bertugas yaitu 1/3 dari jumlah keseluruhan. Faktanya, saat ini personil yang bertugas hanya 25 orang/hari yang dibagi 2 yaitu di pos induk dan pos pembantu di Jalan Kyai Mojo. Rekrutment BALAKAR dilakukan dengan membagikan pamflet di berbagai papan pengumuman dan penyebaran informasi lewat sosial media.

Proses seleksi dalam rekrutment BALAKAR dilakukan dengan seleksi tertulis, wawancara mengenai komitmen dalam bekerja dan pengetahuan yang cukup mengenai kebakaran serta dilihat juga dari kualifikasi fisik calon personil. Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mencari calon personil dengan keahlian khusus karena dibutuhkan keterampilan dalam menjalankan dan mengelola alat-alat kebakaran yang tidak sembarang orang dapat mengoperasikannya. Karakteristik pendaftar seperti ini pada tahun 2017 ada pada ahli bengkel dan fisik olahragawan. Antusiasme dari pihak pendaftar termasuk tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftar dengan total lebih dari 100 orang namun jumlah yang diterima hanya sekitar 30 orang.

Adapun kualifikasi BALAKAR yang dipilih diantaranya sehat secara jasmani dan rohani, berat badan, tinggi badan yang ideal, komitmen dalam bekerja dan pengetahuan yang cukup mengenai kebakaran.

Dalam prosesnya, setelah seleksi dilakukan, terpilih 30 orang untuk menjadi BALAKAR. Proses berikutnya yaitu pemberian bimbingan pada BALAKAR yang diikuti oleh 30 orang peserta. Yaitu 6 orang perempuan dan 24 orang laki-laki.

Pemberian bimbingan kepada BALAKAR dilakukan kurang lebih 10 hari dengan arahan dari aparatur senior bidang pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan bertempat di pos pemadam kebakaran di Jalan Kenari dan Jalan Kyai Mojo. Adapun kegiatan yang dilakukan peserta BALAKAR adalah penjelasan alat proteksi, cara memadamkan api, dan latihan fisik semi militer seperti olahraga lari, push up, panjat-memanjat. Waktu pemberian bimbingan dimulai setelah subuh hingga jam 7 pagi, kemudian di waktu siang dilakukan pendalaman materi, selanjutnya sore hari dilakukan praktek materi yang telah didapatkan sebelumnya. Selama proses pendidikan, peserta BALAKAR dapat dikatakan disiplin, sigap, dan siaga mengikuti arahan instruktur. Hal ini didukung dengan motivasi, kondisi fisik, pengetahuan mengenai bencana kebakaran dan latar belakang pendidikan.

Grafik 1. latar belakang pendidikan peserta BALAKAR pada tahun 2017



Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2017)

Dari data di atas dapat dideskripsikan bahwa latar belakang pendidikan peserta BALAKAR pada tahun 2017 didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yakni 10 orang,

kemudian untuk lulusan SMA 7 orang, MA 2 orang, D3 3 orang, S1 2 orang. Saat ini kelanjutan BALAKAR sebanyak 23 orang memiliki status kepegawaian sebagai tenaga teknis non PNS di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

Koordinasi

Salah satu unsur penting agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal adalah dengan melakukan koordinasi. Koordinasi dilakukan oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta pada pertemuan yang diadakan 3 bulan sekali, dimulai dari tahun 2017 dengan melibatkan Dinas Kebakaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Koordinasi tersebut dihadiri oleh Pemadam Kebakaran Gunung Kidul, Pemadam Kebakaran Kulon Progo, Pemadam Kebakaran Bantul dan Pemadam Kebakaran Sleman. Dengan adanya koordinasi muncul suatu keterkaitan antara satu dengan lainnya. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan rapat langsung, surat dan telepon.

Koordinasi yang dilakukan diperlukan dalam langkah pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi di lapangan, dalam koordinasi dapat dibahas secara langsung apakah langkah yang akan diambil dapat secara efektif mengatasi permasalahan ataukah perlu ditinjau ulang terkait dengan langkah penanganan selanjutnya. Keuntungan dalam melakukan koordinasi yaitu saran dapat diterima, ditanyakan, dan disanggah secara langsung pada tiap perwakilan daerah yang bersangkutan.

Koordinasi dapat mengaktifkan alur komunikasi, seperti pada kejadian pasca kebakaran, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkoordinasi dengan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta akan ikut turun tangan dalam memberi bantuan pada

korban kebakaran. Pemberian bantuan telah dikoordinasikan sebelumnya, hal ini terjadi sinkronisasi dan menghindari tumpang tindihnya bantuan yang sejenis.

Selain koordinasi dengan pihak eksternal, koordinasi juga dilakukan oleh internal Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta. koordinasi internal dilakukan untuk perumusan kebijakan, penanganan bencana, dan kerjasama seperti simulasi atau latihan dengan instansi lain.

Kerjasama

Menurut Abdulsyani (1994) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Kerjasama yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dilakukan dengan unit Dinas Kesehatan (YES 119), Dinas Sosial, Satuan Polisi, dan BPBD. Saat kejadian kebakaran, masing-masing unit turut ikut ke lokasi dan bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Tabel 3. 3 Kerjasama yang Dilakukan Dinas Kebakaran Dengan Instansi Lain:

No	Instansi	Hubungan Kerjasama
1	Dinas kesehatan (Yes 119)	Menyediakan mobil ambulance dan dokter
2	Dinas Sosial	Memberikan bantuan dana korban kebakaran
3	Satuan Polisi	Mengamankan lokasi kejadian kebakaran
4	BPBD	Melaporkan data kebakaran

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2017)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan Dinas kesehatan PSC (Yes 119) adalah bekerjasama dalam pertolongan pertama korban kebakaran. Pos jaga dari PSC (Yes 119) berlokasi di sebelah kantor

operasional Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, sehingga saat kejadian kebakaran berlangsung, dengan sigap dan siaga dokter, perawat, peralatan medis, dan mobil ambulance langsung pergi ke lokasi kejadian kebakaran mengikuti mobil pemadam kebakaran untuk memberi pertolongan dan perawatan pada korban.

Kerjasama yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan dinas sosial adalah kerjasama dalam pemberian pada korban bencana kebakaran. Bantuan tersebut dapat berupa makanan siap santap, buku-buku anak, pemberian subsidi dan alat masak.

Sementara itu, kerjasama yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan satuan polisi adalah bekerjasama dalam mengamankan barang-barang korban kebakaran. Hal ini karena dikhawatirkan ada beberapa pihak yang memanfaatkan bencana kebakaran sebagai peluang mendapatkan barang korban, atau dapat dikatakan kasus pencurian.

Kerjasama yang dilakukan BPBD adalah dalam hal informasi dan bantuan saat terjadi bencana.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari peran koordinator yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta telah terbilang maksimal dalam hal koordinasi, pemberian bangunan dan kerjasama. Namun dari aspek pengawasan perlu ditingkatkan dan dinaungi peraturan daerah yang kuat guna menindaklanjuti bangunan yang tidak sesuai dengan standar proteksi yang telah ditetapkan.

3. Peran Fasilitator

Membangun infrastruktur damkar

Akibat semakin tingginya pembangunan di perkotaan, menimbulkan kepadatan pada suatu wilayah hal ini juga

membuat potensi bencana kebakaran tidak dapat dihindari. Infrastruktur pemadam kebakaran sebagai alat yang mendukung upaya pemadam kebakaran sangat diperlukan keberadaannya.

Dalam hal infrastruktur, Dinas Pemadam Kebakaran telah mempunyai 2 gedung yakni pos induk di balai kota dan 1 pos pembantu di jalan kyai mojo. Dengan pembagian : 3 regu yang berjaga di balai kota dan 2 regu yang berjaga di kyai mojo. Sedangkan dari segi fasilitas operasional dilengkapi dengan Alat Perlengkapan Dasar (APD) yang digunakan saat penanganan kebakaran mulai dari helm, jaket tahan panas, sepatu safety boot, kaca mata, dan masih banyak lagi.

Melihat kondisi kepadatan kota sekarang, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta berencana membuat 1 lagi pos pemadam kebakaran yang terletak di tengah kota hal ini bertujuan agar respon time lebih cepat jika jarak pos dekat dengan wilayah penduduk. Target respon time yang semula 15 menit kini di targetkan 10 menit telah mencapai lokasi kejadian.

Dari segi fasilitas yang ada di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, perlu dilakukan beberapa perbaikan mulai dari gedung yang perlu disempurnakan konstruksinya dan kendaraan lama yang perlu diganti. Namun hal tersebut tergantung pada ketersediaan anggaran yang ada.

Selain fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungan pos Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, ada pula fasilitas lain yaitu hidran kering untuk memfasilitasi pemukiman padat penduduk yang kesulitan air. Hidran yang ada dipasang dengan perangkat pipa bawah tanah yang kemudian di supply oleh mobil damkar. Selain hidran, ada juga 14 tandon atau bak air bersih dengan kapasitas 30.000 liter di bawah tanah yang tersedia di setiap kecamatan sehingga jika terjadi kebakaran, petugas

kebakaran tidak perlu kembali ke pos utama untuk menyedot air, hal ini dengan lebih efektif dan cepat dalam menanggulangi kebakaran.

Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

Salah satu upaya Dinas Kebakaran untuk menurunkan angka kebakaran adalah dengan melakukan penyuluhan dan edukasi. Dalam Aspek ini, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta membedakan sasaran dari keduanya. Penyuluhan di sini dikategorikan untuk masyarakat luas kalangan dewasa, sedangkan edukasi di peruntukan untuk kalangan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

Penyuluhan dilakukan oleh seksi penyuluhan dan edukasi dan telah dilakukan sebanyak 55 kali selama tahun 2017 atau di targetkan 8 kali kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 bulan. Dengan target 55 orang peserta yang hadir di setiap pertemuan, penyuluhan dilakukan di area fasilitas publik dan swasta. Durasi penyuluhan dan edukasi adalah 3-4 jam. Kota Yogyakarta dengan Total 632 Rw dan ratusan pasar yang ada masih berusaha untuk digapai seluruhnya agar penyuluhan dan edukasi dapat merata dan diketahui seluruh kalangan.

Dengan latar belakang penyebab tingginya kebakaran di Kota Yogyakarta yang disebabkan oleh kompor gas, lilin, dan listrik maka materi yang disampaikan selama penyuluhan lebih di tekankan pada aspek pencegahan. Sementara aspek penanggulangan dilakukan lebih kepada prakteknya seperti arahan cara memasang kompor gas, cara menjaga titik-titik kebersihan di dapur dan penanganan ketika kerusakan kompor gas guna menghindari ledakan. Adapun penyuluhan listrik diarahkan pada pemasangan instalansi

kabel seperti pengecekan keadaan kabel stop kontak, kebersihan atap agar terhindar dari tikus yang dapat merusak instalasi listrik dan kegiatan sehari-hari yang bersentuhan dengan kelistrikan.

Penyuluhan sangat penting dilakukan karena masyarakat masih takut dan minim pengetahuan kebakaran seperti pada masalah konsleting listrik dan kompor. Namun setelah penyuluhan dilakukan peserta yang sebelumnya tidak berani kemudian mencoba dan bisa memasang regulator kompor sendiri.

Target penyuluhan diutamakan pada daerah rawan kebakaran seperti di wilayah Kota Gede, Wirobrajan, Mantirejon, Marganesan, dan Prawirotaman. Wilayah tersebut dipilih karena merupakan kawasan padat penduduk yang sulit terjangkau mobil damkar. Penyuluhan tidak terbatas pada area publik dan swasta, namun penyuluhan juga dilakukan pada kalangan mahasiswa seperti yang telah dilakukan yaitu memberikan penyuluhan pada kampus-kampus seperti UPN dan UGM.

Pihak di luar dinas kebakaran terbantu dan merasa puas terhadap pelayanan yang telah dilakukan. Kepuasan tersebut bisa dirasakan dari penyampaian teori, materi penyuluhan dan sasaran yang tepat.

Sementara itu, masyarakat di daerah perumahan merespon dengan antusias adanya penyuluhan ini bahkan antusias dari masyarakat di beberapa tempat membuat kuota peserta penyuluhan melebihi jumlah yang telah ditetapkan. konsumsi dan penyampaian materi yang memuaskan warga karena telah dipahamkan terlebih dahulu bahwa penyuluhan yang disampaikan adalah guna keamanan kenyamanan warga untuk membentuk keluarga yang aman dan bahagia.

Dalam penyuluhan juga disediakan uang transportasi Rp 25.000 namun dipotong pph 6% = 23.500 yang akan diterima peserta. Uang tersebut diarahkan tidak untuk keperluan pribadi tetapi untuk memberi baterai atau senter hal ini karena kondisi alam yang tidak menentu memerlukan sumber pencahayaan lain selain dari arus listrik.

Adapun kendala pada tahun 2017 yaitu penyuluhan bertepatan pada bulan ramadhan dan hari libur, kesamaan permintaan waktu penyuluhan antar rw karena dinas harus menyesuaikan dengan waktu peserta penyuluhan, dan juga terkendala agenda dinas seperti latihan gabungan dan penyelesaian LPJ.

Edukasi bahaya kebakaran

Edukasi dilakukan dengan menerima kunjungan taman kanak-kanak dan sekolah dasar dengan target 1 tahun 30 kali kunjungan, ternyata pada tahun 2017 jumlah kunjungan berkali lipat menjadi 67 kali. Kunjungan edukasi telah mencapai waiting list sampai tahun depan sehingga pihak dinas banyak menolak kunjungan. Materi yang disampaikan adalah mengenai tugas-tugas pemadam kebakaran, dan praktek menjadi petugas pemadam kebakaran memakai pakaian tugas lapangan. Dalam edukasi juga dijelaskan bahwa tugas pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api tapi juga menangkap ular, menyelamatkan kucing yang masuk ke sumur, penanganan rumah tawon, penanganan anjing dan lain sebagainya. Selain itu, nilai-nilai syiar agama dan kemandirian juga di libatkan dalam edukasi dengan anak-anak seperti mandi, makan sendiri dan menggunakan baju dengan tangan kanan terlebih dahulu.

Sementara itu, kendala yang dihadapi saat edukasi adalah saat wali murid mengikuti rangkaian kegiatan edukasi, para wali murid ingin

mendahulukan anaknya masing-masing untuk mencoba penggunaan alat sehingga kondisi edukasi menjadi tidak kondusif. Anak-anak cenderung menikmati dunianya masing-masing ketika edukasi diberikan hal ini membuat petugas penyuluhan.

Secara garis besar, peran fasilitator telah mampu dijalankan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yakni diwujudkan dengan membangun infrastruktur Dinas Kebakaran seperti pos pemadam, di balai kota dan jalan Kyai Mojo. Dalam hal pembangunan pos pemadam, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta masih mengupayakan penambahan 1 pos lagi guna kelancaran respon time 10 menit semenjak kejadian kebakaran. Kendaraan Dinas dan alat pemadam api yang dimiliki dapat dikatakan menunjang penanganan tugas kebakaran walaupun tetap diperlukan beberapa alat lain guna pelayanan yang lebih baik. Selain dari segi alat, penyuluhan dan edukasi yang dilakukan dapat menambah pemahaman masyarakat luas dan anak-anak terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sehingga diharapkan, semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran yang mungkin terjadi tanpa dapat diketahu kapan dan dimana tempat terjadinya.

4. Peran Stimulator

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Seiring dengan terus berkembangnya masalah perkotaan termasuk bencana kebakaran, diperlukan petugas pemadam kebakaran yang siap, siaga, dan menguasai teknik penyelamatan. Begitupun dengan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan total sumber daya aparatur PNS dan non PNS sebanyak 80 orang terus memerlukan program peningkatan kapasitas sumber daya

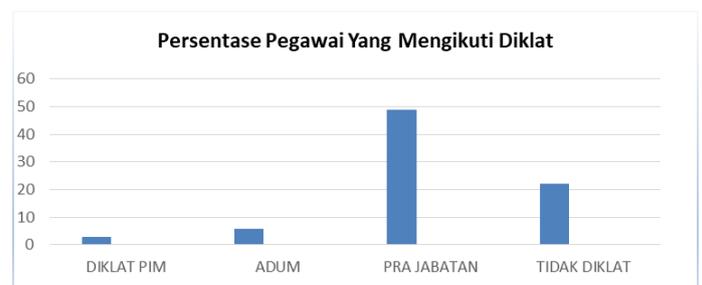
aparatur untuk menjadi staff yang mempunyai kualifikasi standar.

grafik 2. Latar belakang pendidikan pegawai Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.



Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2017)

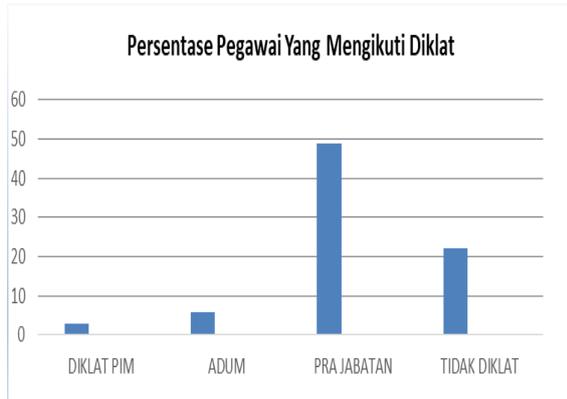
Dari grafik diatas dapat dikatakan bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yakni 10 orang, kemudian untuk lulusan SMA sebanyak 7 orang, MA 2 orang, D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 2 orang.



Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2017)

Grafik 3. 3

Persentase Pegawai Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Yang Mengikuti Diklat Pada Tahun 2017



Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2017)

Dari persentase di atas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tidak seluruhnya mengikuti diklat, diklat PIM diikuti 1 orang, diklat adum diikuti 3 orang, diklat prajabatan diikuti 49 orang, sedangkan yang tidak mengikuti diklat yaitu sebanyak 21 orang. Dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2017, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mengikuti kegiatan pendidikan kilat sebagai berikut:

1. Diklat Fire fighter

- a. Tempat penyelenggaraan : Riau
- b. Peserta : 8 orang

2. Diklat inspektur

- a. Tempat penyelenggaraan : Jakarta
- b. Peserta yang dikirim : 4 orang

3. Diklat pemadam kebakaran ciracas

- a. Tempat penyelenggaraan : Jakarta
- b. Peserta yang dikirim : 3 orang

4. Diklat peningkatan kapasitas

- a. Tempat penyelenggaraan : Yogyakarta

- b. Peserta yang dikirim: 25 orang

5. Diklat pemadam kebakaran

- a. Tempat penyelenggaraan : Yogyakarta

- b. Peserta yang dikirim : 25 orang

Selain upaya diklat yang telah dilakukan di atas, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta juga mengupayakan diklat internal dengan mengundang pembicara untuk mengisi materi di dalam wilayah Dinas. Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadikan menyelenggarakan pendidikan dasar belum optimal. Selain itu, dengan adanya tenaga teknis baru membuat anggaran semakin besar. Diklat yang diperlukan aparatur dinas juga bermacam-macam seperti diklat rescue, penanganan ular, diklat lanjutan dan sebagainya karena masalah yang ada terus berkembang.

Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran

Upaya yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta guna mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah dengan melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran. Pengelolaan ini dilakukan oleh bidang penanggulangan kebakaran khususnya seksi operasional dan penyelamatan.

Pengelolaan sarana yang ada dilakukan pada fasilitas yang dimiliki misalnya pada mobil pemadam kebakaran yang memiliki mesin khusus yang juga memerlukan pemeliharaan khusus. Mobil dengan kondisi tidak layak pakai juga memerlukan pengadaan yang baru. Sarana yang prima diperlukan untuk bekerja karena penanganan kebakaran harus cepat responnya, 10 menit harus ada di tempat kejadian perkara.

upaya pengelolaan telah dilakukan dengan adanya anggaran khusus guna perawatan dan pemeliharaan mobil operasional. Bagian-bagian mobil mulai dari mesin, selang air, sirine dan ADP harus siap karena berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan pengelolaan, setiap pagi dan malam pergantian shift dilakukan pengecekan berkala, pagi dilakukan serah terima laporan. Laporan tersebut berisi data mengenai siapa operasional yang bertugas, jenis mobil, kelengkapan, dan kerusakan yang ada pada kendaraan tertulis di laporan. Pelaporan ini menjadikan alat-alat dapat terpelihara dan siap pakai sewaktu-waktu kejadian darurat. Upaya pengelolaan prasarana Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tidak hanya di dalam Dinas namun juga sarana prasarana di luar dinas seperti di alun-alun, halaman kecamatan, dan taman kota selalu dilakukan pemeliharaan terhadap tampon atau bak penampung air dengan pemeriksaan keberadaan air agar tidak kosong dan siap di gunakan juga pemeriksaan kelayakan air PAM.

Adapun kendala yang ditemukan dalam aspek pengelolaan sarana dan prasaran yaitu dari pihak operasional lebih meningkatkan pengawasan pengecekan hal ini agar memudahkan perbaikan alat dengan segera. Kemudian dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) yang masih dalam rangka pembuatan, dan baru ditetapkan pada tahun 2019 hal ini karena aparaturnya dinas belum lengkap dan masih terjadi pelemparan tanggung jawab sehingga belum ada SOP tetap. Selain itu, umur mobil juga harus diperhatikan karena harus dilakukan pergantian dengan ketentuan 5 tahun sekali berganti unit namun karena keterbatasan anggaran belum dapat dilakukan penyesuaian adapun harga 1 unit bisa berkisar 1 miliar – 2 miliar.

Kesimpulan dari peran Dinas Kebakaran dalam hal stimulator yaitu peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya dan pengelolaan sarana prasarana kebakaran. dalam hal peningkatan sumber daya aparaturnya melalui berbagai diklat ditujukan agar aparaturnya Dinas mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. kejadian yang banyak ditemui dilapangan tidak sebatas pemadaman api saja, melainkan dapat berupa penyelamatan lain seperti penyelamatan dari sarang tawon dan ular. Maka perlu terus ditingkatkan diklat dari berbagai aspek penyelamatan. Sedangkan dari pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan telah dilakukan setiap hari secara berkala, hal ini agar kendaraan optimal, siap pakai dan respon time kebakaran dapat segera tercapai ke tempat tujuan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Peran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dalam Mencegah Dan Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2017 maka dapat ditarik kesimpulan:

Dalam menjalankan peran wirausaha, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pemerintah daerah menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan aset mobil pemadam kebakaran untuk tujuan yang bersifat ekonomi. Penyewaan aset Dinas diatur pada peraturan daerah Kota Yogyakarta No 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha yang masuk ke kas daerah dan menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi yang diatur dalam peraturan daerah. Peran wirausaha telah dijalankan dengan memaksimalkan potensi yang ada, selama tahun 2017 sewa aset yang dihasilkan

adalah sebesar Rp 44.930.000.

Salah satu unsur penting agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal adalah dengan melakukan koordinasi. Koordinasi dilakukan oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta pada pertemuan yang diadakan 3 bulan sekali, dimulai dari tahun 2017 dengan melibatkan Dinas Kebakaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan dihadiri oleh pemadam kebakaran Gunung Kidul, Pemadam Kebakaran Kulon Progo, Pemadam Kebakaran Bantul dan Pemadam Kebakaran Sleman. Dengan adanya koordinasi muncul suatu keterkaitan antara satu dengan lainnya. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan rapat langsung, surat dan telepon. Dari kegiatan koordinasi terjadi jalinan komunikasi yang dapat saling membantu dalam penanganan bencana di wilayah DIY juga terjadi pertukaran informasi, sehingga di dapatkan informasi yang baru. Selain koordinasi, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta juga melakukan kerjasama dengan instansi lain yang melibatkan unit BPBD, YES 119, Satuan Polisi dan Dinas Sosial. Peran Fasilitator

Dalam hal infrastruktur, Dinas Pemadam Kebakaran telah mempunyai 2 gedung yakni pos induk di balai kota dan 1 pos pembantu di jalan Kyai Mojo. Dengan pembagian : 3 regu yang berjaga di balai kota dan 2 regu yang berjaga di Kyai Mojo. Sedangkan dari segi fasilitas operasional dilengkapi dengan Alat Perlengkapan Dasar (APD) yang digunakan saat penanganan kebakaran mulai dari helm, jaket tahan panas, sepatu safety boot, kaca mata, dan masih banyak lagi.

Selain fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungan pos Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, ada pula fasilitas lain yaitu hidran kering untuk memfasilitasi pemukiman padat penduduk yang kesulitan air. Hidran yang ada dipasang dengan

perangkat pipa bawah tanah yang kemudian di supply oleh mobil damkar. Selain hidran, ada juga 14 tandon atau bak air bersih dengan kapasitas 30.000 liter di bawah tanah yang tersedia di setiap kecamatan. Sebagai bagian dari peran dari fasilitator adalah Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran. Dalam Aspek ini, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta membedakan sasaran dari keduanya. Penyuluhan di sini dikategorikan untuk masyarakat luas kalangan dewasa, sedangkan edukasi di peruntukan untuk kalangan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

Penyuluhan dilakukan oleh seksi penyuluhan dan edukasi dan telah dilakukan sebanyak 55 kali selama tahun 2017 atau di targetkan 8 kali kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 bulan. Dengan target 55 orang peserta yang hadir di setiap pertemuan, penyuluhan dilakukan di area fasilitas publik dan swasta. Durasi penyuluhan dan edukasi adalah 3-4 jam. Kota Yogyakarta dengan Total 632 Rw dan ratusan pasar yang ada masih berusaha untuk digapai seluruhnya agar penyuluhan dan edukasi dapat merata dan diketahui seluruh kalangan.

Sedangkan untuk edukasi, dilakukan dengan menerima kunjungan taman kanak-kanak dan sekolah dasar dengan target 1 tahun 30 kali kunjungan, ternyata pada tahun 2017 jumlah kunjungan berkali lipat menjadi 67 kali. Dalam edukasi juga dijelaskan bahwa tugas pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api tapi juga menangkap ular, menyelamatkan kucing yang masuk ke sumur, penanganan rumah tawon, penanganan anjing dan lain sebagainya.

Dalam aspek stimulator yaitu upaya-upaya khusus yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua yaitu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pengelolaan sarana prasarana kebakaran. dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Dinas Kebakaran Kota

Yogyakarta dengan total sumber daya aparatur PNS dan non PNS sebanyak 80 orang terus memerlukan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk menjadi staff yang mempunyai kualifikasi standar. Dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2017 Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mengikuti kegiatan pendidikan kilat yaitu Fire fighter, diklat inspektur, diklat pemadam kebakaran ciracas, diklat peningkatan kapasitas, diklat pemadam kebakaran

Pendidikan dasar diperlukan karena Dinas Kebakaran membutuhkan skill untuk penanganan kebakaran, namun hal tersebut belum optimal dilakukan karena ada keterbatasan anggaran. Ditambah lagi dengan adanya tenaga teknis yang baru dan belum pernah melakukan diklat secara khusus seperti pendidikan kilat fire fighter atau pemadam 1. Kemudian dalam hal Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran dilakukan pada fasilitas yang dimiliki misalnya pada mobil pemadam kebakaran yang memiliki mesin khusus yang juga memerlukan pemeliharaan khusus. Mobil dengan kondisi tidak layak pakai juga memerlukan pengadaan yang baru. Sarana yang prima diperlukan untuk bekerja karena penanganan kebakaran harus cepat responnya, 11 menit harus ada di tempat kejadian perkara.

dilakukan pemeliharaan tampon atau bak penampung air dilakukan pemeriksaan keberadaan air agar tidak kosong dan pemeriksaan kelayakan air PAM.

6. SARAN

1. Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta diharapkan mampu mengoptimalkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

2. Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan diharapkan mampu dijaga dan ditingkatkan jangkauannya

3. Peraturan daerah yang ada mengenai pencegahan dan penanggulangan diharapkan mampu diimplementasikan agar regulasi dapat ditegakan untuk kebaikan seluruh pihak

4. Dalam hal keamanan diharapkan dapat ditingkatkan agar proteksi kebakaran dapat ter realisasi terutama di tempat-tempat usaha

DAFTAR PUSTAKA

Adelberty. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota urabaya. Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2(No. 1), 216–223.

Bintoro. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pembangunan Pertanian Menuju Kedaulatan Pangan (Studi Kasus Di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen Tahun 2014-2015). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli - Materi Belajar. (n.d.).

Hargiyarto, P. (2003). Pencegahan dan pemadaman kebakaran, 7.

Iraniana, R. (2009). Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagai antisipasi dini terhadap bahaya kebakaran di pusdiklat migas cepu.

Kajian, S., Di, P., & Sarijadi, P. (2005). Kajian Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Perumahan. Universitas Stuttgart, 3(1).

KepMen No. 186. (1999). Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja. Keputusan Presiden R.I. Nomor Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, 1(4), 1–15.

Kota, K., & Pada, P. (2012). No Title, 2012, 1–15.

Negara, M., & Umum, P. (2000). Kepmen PU No.11/KPTS/2000.

Sumatera Utara, U. (2017). Analisis Sistem Proteksi Aktif Dan Sarana Penyelamatan Jiwa Sebagai Upaya Penanggulangan Kebakaran Di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar Tahun 2017. Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id/>

Penanggulangan, B., Daerah, B., Nasional, B. S. A. R., Kebakaran, P. P., & Purwakarta, K. (2017). Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2017.

PERHUBUNGAN, K., & KEME. (n.d.). Pedoman Induk Penanggulangan Darurat Kebakaran Dan Bencana Alam Di Lingkungan, (8).

Rahajeng, U., Ilmu, J., Negara, A., Sosial, F. I., & Yogyakarta, U. N. (2013). Peran pemerintah kota yogyakarta dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel.

Transmigrasi, D. A. N., Gowa, K., & Hasanuddin, U. (2016). Responsivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran Pada Dinas Sosial , Tenaga Kerja.

Waya, R. W. A. Y. (n.d.). Dalam Meresolusi Konflik Tanah.

Widayanto, P. (2016). Analisis kinerja tim pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan kejadian kebakaran di dinas kebakaran kota semarang.

Buku

Mudrajat Kuncoro (2004). Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan Strategi, Dan Peluang. Erlangga

Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (2018). Buku Pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Yogyakarta , Internal Dinas Kebakaran

Dinas Kebakaran Kota Jakarta (2014). Modul Sensitivity Training Personil. Jakarta, Suku Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Pusat

Peraturan

Keputusan Kepala Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Nomor 188/021 Tentang

Pembentukan Tim Investarisasi Dan Taksasi Kerugian Kebakaran Pada Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018

Peraturan Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24/PRT/M Tahun 2008

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terkena Musibah Kebakaran Di Kota Yogyakarta

Website

Rusqiyati, E. (2015). BPBD Yogyakarta tangani 52 kebakaran hingga awal September. diakses pada 19 juni , 2018, from <https://www.antaranews.com/berita>

Selama 2015 Total Kerugian Mencapai Rp2,04 Miliar : diakses pada 22 juli <https://www.beritaharianjogja.com>